

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab IV, maka simpulan yang dapat diambil pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Kemandirian Daerah secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Hal ini menunjukkan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota masih bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan pinjaman pemerintah pusat/daerah sehingga alokasi belanja modal belum bisa ditingkatkan oleh pemerintah daerah. Dikarenakan setiap tahunnya anggaran pemerintah daerah lebih banyak dialokasikan untuk kebutuhan belanja pegawai.
2. Variabel *Tax Effort* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin besar upaya pajak suatu daerah kabupaten/kota, maka pendapatan asli daerah juga akan meningkat. Sehingga pemerintah daerah dapat membuat daerahnya semakin berkembang dengan memperbesar investasi yang dilakukan.
3. Variabel Pertumbuhan Ekonomi secara parsial tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak memberikan dana langsung kepada daerah. Pertumbuhan ekonomi hanya memperlihatkan keadaan perekonomian daerah dan tidak memberikan pemasukan kepada daerah. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi hanya menunjukkan sejauh mana kegiatan perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu tanpa memberikan dana yang dapat meningkatkan pengalokasian anggaran belanja modal sehingga peningkatan alokasi belanja modal tidak berpacu

4. pada pertumbuhan ekonomi melainkan bergantung pada kebutuhan akan sarana dan prasarana pada daerah tersebut.
5. Variabel Pendapatan Asli Daerah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. Hasil ini menjelaskan bahwa provinsi dengan Pendapatan Asli Daerah yang besar terkadang cenderung tidak memiliki belanja modal yang besar dikarenakan Pendapatan Asli Daerah lebih banyak dimanfaatkan untuk membiayai belanja lain, seperti belanja rutin/operasional. Selain itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah belum tentu akan diikuti dengan peningkatan anggaran belanja modal tergantung pada situasi dan kondisi tiap-tiap daerah.
6. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Kemandirian Daerah, *Tax Effort*, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah secara simultan berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Nilai Koefisien Determinasi adalah sebesar 0,212. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah berupa Kemandirian Daerah, *Tax Effort*, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah sebesar 21,0% dan sisanya 79,0% yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

5.2 Saran

Adapun beberapa hal yang dapat menjadi saran dalam penelitian ini berdasarkan hasil analisis sebelumnya yang dapat berguna bagi pihak-pihak terkait adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan

Hasil penelitian ini menunjukkan variabel Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal. Dalam hal ini pemerintah daerah kabupaten/kota harus bisa menggali lagi potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah untuk meningkatkan kemandirian daerahnya agar menunjang alokasi belanja modal, serta lebih mengatur alokasi belanja modal daerahnya

agar lebih proporsional dengan belanja daerah yang lain. Serta pendapatan asli daerah yang diterima oleh pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan, dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat seperti pengalokasian kepada belanja modal untuk penyediaan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

2. Bagi Penelitian Selanjutnya.

Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel lain yang dapat mempengaruhi Alokasi Belanja Modal. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menggunakan instrumen kuesioner dan melakukan pengamatan langsung ke pemerintah daerah, serta melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan menggunakan model pendekatan kualitatif.

